



# **RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

***TAHUN 2025 - 2029***

Perpustakaan Daerah  
Kabupaten Kepulauan Anambas

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini menjadi pedoman strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah. Dengan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi, Renstra ini disusun sebagai bentuk perencanaan yang responsif terhadap tantangan pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik melalui masukan, data, maupun pemikiran strategis, dalam proses penyusunan dokumen ini. Harapan kami, Renstra ini tidak hanya menjadi panduan kerja, tetapi juga mampu mendorong sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, serta menjadi dasar untuk peningkatan kinerja organisasi yang lebih baik di masa mendatang.

Tarempa, 15 September 2025

Kepala Dinas  
Perpustakaan dan Arsip Daerah,



Rusmanda Azmurani, S.Sos.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197006242003121005



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Landasan Hukum.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Maksud dan Tujuan.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3.1 Maksud .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3.2 Tujuan.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2 Sumber Daya Aparatur.....</b>	<b>11</b>
<b>2.2.1 Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan.....</b>	<b>12</b>
<b>2.2.2 Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan.....</b>	<b>12</b>
<b>2.2.3 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin.....</b>	<b>13</b>
<b>2.3 Kinerja Pelayanan.....</b>	<b>14</b>
<b>2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....</b>	<b>19</b>
<b>2.4.1 Bidang Perpustakaan .....</b>	<b>19</b>
<b>2.4.2 Bidang Arsip .....</b>	<b>19</b>
<b>2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....</b>	<b>19</b>
<b>2.5.1 Tantangan .....</b>	<b>19</b>
<b>2.5.2 Peluang.....</b>	<b>21</b>
<b>2.6 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis .....</b>	<b>22</b>
<b>2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....</b>	<b>23</b>
<b>2.8 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....</b>	<b>27</b>



2.9	Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	28
2.9.1	Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional.....	28
2.9.2	Telaahan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia .....	29
2.10	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	31
2.11	Penentuan Isu-isu Strategis.....	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....		35
3.1	Tujuan dan Sasaran .....	35
3.2	Strategi dan Arah Kebijakan .....	38
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....		40
4.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan .....	40
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	46
BAB V PENUTUP .....		48



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan.....	12
Tabel 2. 2 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	13
Tabel 2. 3 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin .....	13
Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Pendukung .....	14
Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.....	16
Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas .....	18
Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	25
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	36
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	38
Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas .....	42
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran ....	47
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kunci .....	47



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.....</b>	<b>11</b>
---	-----------



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 - 2029 merupakan upaya strategis dalam menjamin keberlangsungan perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menggariskan perlunya keterpaduan antara berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini menjadi dasar bagi setiap institusi pemerintahan untuk menyusun perencanaan yang terarah, sistematis, dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam konteks daerah, perencanaan pembangunan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan ini memberikan panduan teknis terkait tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi dokumen pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra sebagai bagian integral dari RPJMD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tugas dan fungsi perangkat daerah selaras dengan visi dan misi kepala daerah.

Sebagai lembaga yang berperan dalam penguatan urusan perpustakaan dan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Dengan adanya dinamika sosial-ekonomi, penyusunan Renstra ini menjadi penting untuk merumuskan strategi yang relevan dalam



menjawab berbagai hambatan dalam usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan literasi masyarakat serta dalam usaha penguatan pengelolaan arsip dan informasi sebagai instrumen utama dalam transparansi dan akuntabilitas administrasi publik.

Penyusunan dokumen ini juga bertujuan untuk menjawab kebutuhan perencanaan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Renstra ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang inklusif.

Sebagai bentuk implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi, penyusunan Renstra ini mengacu pada data dan informasi yang valid, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebelumnya. Dengan demikian, Renstra Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi pedoman yang efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan panjang.

Melalui dokumen ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan landasan hukum yang kuat dan pendekatan yang holistik, Renstra ini diharapkan mampu menjadi pedoman yang strategis dan aplikatif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah ini.



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024
19. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan



Daerah.

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan usunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 103 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor



103);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 100)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029
28. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255)
29. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

#### **1.3.2 Tujuan**

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan arah kebijakan strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang sesuai dengan isu-isu strategis di



- bidang perpustakaan dan arsip daerah.
2. Memastikan keterpaduan antara Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan kebijakan pembangunan nasional
  3. Menyediakan dasar perencanaan yang jelas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat diukur melalui indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*).
  4. Membangun sinergi yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan.
  5. Mengadaptasi rencana kerja organisasi dengan perkembangan kondisi lokal, nasional, dan global untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
  6. Menjadi acuan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi, sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan pada setiap siklus perencanaan pembangunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**



Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, telaah dan rumusan isu-isu strategis.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP.**



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kedua regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas ini berfungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan



7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perpustakaan
4. Bidang Arsip Daerah

Lebih lanjut Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

*Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas*



## 2.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Per Januari 2025 berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh ) Orang terdiri dari 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 14 Pegawai Tidak Tetap. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan



kualifikasi pegawai sebagai berikut:

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :

*Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan*

Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Jumlah
Pembina Utama Muda / IV.c	Eselon II.b	1
Pembina / IV.a	Eselon III.a	1
Penata Tk. I / III.d	Eselon III.b	2
Penata/ III.c	Eselon IV.a	1
Penata Tk.I/III.d	Pelaksana	1
Penata Muda	Fungsional	4
Pengatur Tingkat I/II.d	Pelaksana	1
PPPK	IX	8
Terampil	VII	4
Penata Layanan Operasional /IX	V	11
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah sumber daya aparatur Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah di dominasi oleh jabatan pelaksana yang berjumlah 22 orang, jabatan fungsional yang terdiri dari 7 orang jabatan eselon II.b berjumlah1 orang, eselon III.a berjumlah 1 orang, eselon III.b berjumlah 2 orang, eselon IV.a berjumlah 1 orang.

### 2.2.2 Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Dinas Perpustakaan dan



Arsip Daerah tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

*Tabel 2. 2 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan*

Sumber Daya Aparatur	Kualifikasi Pendidikan	
PNS	S2 :	2
	S1 :	9
PPPK	SI :	8
	D3 :	4
	SMA/SMK :	11
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>

### 2.2.3 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah didominasi kaum Laki-laki yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasar kelamin.

*Tabel 2. 3 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin*

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
PNS	6	4
PPPK	8	15
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>19</b>

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Namun, saat ini terdapat tantangan yang signifikan terkait distribusi ASN yang belum merata di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ulang agar ASN dapat terdistribusi dengan baik sesuai kebutuhan tugas, pokok, dan fungsi yang bersifat koordinatif. Penataan ini juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan ASN yang bertugas didominasi oleh lulusan minimal tingkat Sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, pelaksanaan



tugas dapat berjalan secara seimbang dan efisien, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Selain itu, dalam menghadapi kebutuhan sumber daya aparatur yang terus meningkat, perekrutan ASN menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam lima tahun mendatang.

Tak kalah penting, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

*Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Pendukung*

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Meja Kerja Eselon II	1	2023
2	Meja Kerja Eselon III	3	2024
3	Meja Kerja Eselon IV	6	2024
4	Kursi Kerja Putar	7	2023
5	Rak Besi	2	2023
6	AC Split	3	2023
7	AC Split	4	2024
8	Sepeda Motor (matic)	1	2023

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan cerminan dari kemampuan instansi dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya, yakni meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan. Pelayanan yang diberikan meliputi peningkatan akses layanan perpustakaan serta



pengelolaan arsip daerah. Dalam pelaksanaannya, kinerja pelayanan ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan optimalisasi peran ASN di setiap unit kerja. Pendekatan yang bersifat koordinatif dan kolaboratif menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh program dan kebijakan berjalan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kinerja pelayanan juga didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas seperti ruang kerja, teknologi informasi, dan perlengkapan administrasi memainkan peran penting dalam mempercepat proses pelayanan. Dengan pemanfaatan teknologi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah telah meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pengelolaan data dan penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi kinerja secara berkala juga dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan, sehingga kualitas pelayanan terus meningkat dan mampu menjawab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah memberikan disrupsi kuat di seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu;



**Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	50	50	55	55	61	-	-	72,34	72,34			-	-	36,17	39,78		
2	Nilai AKIP	-	-	-	-	50	50	55	55	61	-	-	34,21	65,10			-	-	17,10	35,80		
3	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun	-	-	-	0,09	0,21	0,58	0,72	0,80	0,87	0,08	0,61	0,79	1,06			0,007	0,012	0,0045	0,0059		
4	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	-	-	-	0,0015	0,0016	0,0017	0,0018	0,0019	0,0020	0,0020	0,0021	0,0021	0,0025			0,000003	0,0000036	0,0000037	0,0000045		
5	Persentase Pengelolaan Arsip yang Sesuai dengan Standar yang Ditetapkan	-	-	-	-	25%	35%	50%	65%	70%	-	30,5%	43,2%	50%			-	0,00076	0,0015	0,0025		



Berdasarkan data capaian kinerja, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menunjukkan peningkatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi strategisnya. Pada indikator *Nilai Reformasi Birokrasi*, terlihat adanya target peningkatan yang konsisten dari 55 pada tahun 2024 hingga mencapai 61 pada tahun 2026. Hal yang sama juga terlihat pada indikator *Nilai AKIP*, dengan target bertahap dari 55 di tahun 2024 menjadi 61 pada tahun 2026. Capaian ini mencerminkan upaya instansi dalam memperkuat tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, selaras dengan tujuan reformasi birokrasi nasional.

Selain itu, indikator terkait urusan perpustakaan seperti Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun menargetkan peningkatan yang signifikan, meningkat dari 0,72 pada tahun 2024 menjadi 0,87 pada tahun 2026. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk ditargetkan meningkat dari 0,0018 di tahun 2024 menjadi 0,0020 kasus di tahun 2026. Sementara itu, indikator terkait urusan kearsipan yaitu Persentase Pengelolaan Arsip yang Sesuai dengan Standar yang Ditetapkan terus meningkat dari 50% pada tahun 2024 menjadi 70% pada tahun 2026. Data ini menunjukkan komitmen Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, yaitu:



**Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota		-	1.839.421.935	3.152.538.866	3.523.766.828		-	-	1.708.492.366	2.771.274.772					3,14	8,74				
Program pembinaan perpustakaan		188.544.100	1.202.495.864	1.028.442.572	1.104.560.081		-	147.491.965	1.188.050.486	950.057.494				3,55	1,43	9,77				
Program Pengelolaan Arsip		32.499.000	113.142.100	105.167.274	161.627.161		-	32.396.600	108.721.125	96.324.335				1,05	1,23	1,01				



## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Adapun kelompok sasaran layanan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah lembaga /instansi ataupun perangkat daerah yang menjadi mitra dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

### 1. Bidang Perpustakaan

- a. Perpustakaan Sekolah
- b. Perpustakaan Desa
- c. Taman Bacaan Masyarakat

Adapun Perpustakaan sekolah yang dibina berjumlah 100 Perpustakaan, yang terdiri dari Perpustakaan di tingkat SD/MI dan SMP/MTs yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk Perpustakaan Desa berjumlah 26 Perpustakaan. Sedangkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) berjumlah 5 TBM. Dimana TBM ini merupakan salah satu unit layanan dengan berbagai kebutuhan bahan bacaan yang berguna bagi masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan budaya membaca.

### 2. Bidang Arsip

Kelompok Sasaran Layanan pada Bidang Arsip adalah seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### 2.5.1 Tantangan

Dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tantangan-tantangan yang ada mencakup aspek internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, hingga



eksternal, seperti rendahnya minat baca masyarakat dan kesadaran terhadap pentingnya arsip. Namun, di sisi lain, berbagai peluang juga hadir, seperti kemajuan teknologi digital, dukungan kebijakan nasional, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung literasi dan pengelolaan arsip. Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang ini secara komprehensif, diharapkan Dinas mampu merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta berkontribusi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

a. Aspek Internal

Tantangan yang berasal dari aspek internal adalah :

1. Perlu dilakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah agar andal dan memadai di bidang perpustakaan dan kearsipan.
2. Dengan keterbatasan anggaran saat ini, perlu disusun strategi dalam pengelolaan anggaran sehingga anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah penting untuk



dilakukan seperti pengembangan ruang baca dan fasilitas belajar, aksesibilitas yang baik, peningkatan koleksi buku cetak maupun digital dalam usaha meningkatkan minat baca serta fasilitasi pengelolaan arsip yang inovatif dalam usaha pengelolaan pengarsipan yang terpadu.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu :

1. Perlu disiapkan inovasi-inovasi yang menarik dalam usaha peningkatan partisipasi dan minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan dan perkuatan pengelolaan arsip.

## 2.5.2 Peluang

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam lima tahun ke depan adalah :

### 2.5.1.1 Dukungan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi peluang besar untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan. Pengembangan platform digital dapat digunakan untuk penyebaran informasi, pengembangan aplikasi dan sistem baik untuk peningkatan layanan perpustakaan maupun pengelolaan arsip yang terintegrasi.

### 2.5.1.2 Komitmen Pemerintah Daerah

Dukungan dari pemerintah daerah melalui alokasi anggaran dan kebijakan strategis memberikan



peluang dalam pelaksanaan program dan kegiatan baik terutama dalam rangka fasilitasi layanan baik pada urusan perpustakaan maupun kearsipan.

#### 2.5.1.3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran masyarakat pada pentingnya literasi dan edukasi akan semakin meningkat, terutama melalui komunitas diskusi, workshop, seminar, dan sebagainya. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong kolaborasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih efektif dan diminati masyarakat.

#### 2.5.1.4 Potensi Kemitraan dengan Organisasi Non-Pemerintah

Peluang kerja sama dengan LSM, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal dapat memperkuat pelaksanaan program. Mitra strategis ini dapat membantu dalam memberikan pelatihan, pendampingan, serta dukungan teknis untuk kegiatan pembinaan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan.

## 2.6 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu - isu strategis tersebut dapat berupa informasi, kejadian, atau fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.



## 2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang memengaruhi efektivitas dan kualitas layanan kepada masyarakat. Permasalahan ini berkaitan langsung dengan tugas, pokok, dan fungsi yang diemban, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan pengoptimalan pengelolaan kearsipan. Kondisi ini menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian serius agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemahaman terhadap permasalahan ini menjadi dasar penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya pengembangan pelayanan yang lebih baik.

### 1. Bidang Perpustakaan

- Rendahnya kualitas pelayanan perpustakaan  
Fasilitas perpustakaan yang belum memadai, baik dari segi koleksi, ruang baca, maupun akses teknologi serta masih perlunya peningkatan inovasi dalam penyediaan layanan yang menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda.
- Belum Tersedianya Perpustakaan Yang Memenuhi Standar Nasional  
Tingginya standar nasional bagi sebuah perpustakaan di kawasan perbatasan menjadi tantangan tersendiri ditengah berbagai keterbatasan sarana prasarana yang tersedia. Di lain sisi, kurangnya partisipasi pihak swasta, dunia usaha dan lembaga lainnya untuk membina berdirinya perpustakaan yang memenuhi standar mempersulit peningkatan rasio jumlah perpustakaan



yang memenuhi standar nasional.

- Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat  
Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi sebagai bagian dari pembangunan budaya dan pengembangan wawasan.
- Akses Layanan yang Tidak Merata  
Ketimpangan akses terhadap layanan perpustakaan antara wilayah pusat ibukota dan daerah terpencil mengingat kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri atas pulau-pulau.
- Minimnya Anggaran dan Sumber Daya Manusia  
Alokasi anggaran yang terbatas menghambat pelaksanaan program dan pengembangan layanan. Selain itu keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM khusus di bidang perpustakaan yang masih terbatas
- Perubahan perilaku membaca  
Meningkatnya penggunaan media digital, mengurangi minat membaca buku cetak.

## 2. Bidang Arsip Daerah

- Pengelolaan Arsip yang Belum Optimal  
Landasan baku kearsipan belum terbentuk sehingga arsip dinamis belum dikelola sesuai standar, sehingga menghambat akuntabilitas instansi pemerintah. Selain itu arsip statis sebagai warisan sejarah banyak yang belum didigitalisasi atau dilestarikan dengan baik.
- Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi  
Transformasi digital di bidang kearsipan berjalan lambat akibat infrastruktur teknologi yang belum memadai, baik dalam hal penyimpanan, aksesibilitas ke berbagai pengguna serta keamanan.
- Minimnya Anggaran dan Sumber Daya Manusia  
Alokasi anggaran yang terbatas menghambat



pelaksanaan program dan pengembangan layanan. Selain itu keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM khusus di bidang kearsipan masih terbatas.

- Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.

Untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang efektif, perlu dilakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi instansi, meliputi bidang perpustakaan dan kearsipan. Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:

**Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya kualitas pelayanan perpustakaan	Fasilitas perpustakaan yang belum memadai	Alokasi anggaran yang terbatas untuk pengembangan infrastruktur layanan
		Koleksi buku dan bahan bacaan yang kurang bervariasi	Minimnya anggaran pengadaan koleksi dan kurangnya kerja sama dengan penerbit lokal/ nasional
		Rendahnya pemanfaatan layanan oleh masyarakat	Kurangnya inovasi dalam penyediaan program literasi yang menarik dan inklusif
2	Belum Tersedianya Perpustakaan Yang Memenuhi Standar Nasional	Belum adanya perpustakaan daerah yang memenuhi standar nasional	Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pemenuhan standar nasional perpustakaan
3	Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat	Minat baca yang rendah di kalangan masyarakat	Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Literasi sebagai Bagian dari Pembagunan Budaya dan Pengembangan Wawasan



4	Akses Layanan yang Tidak Merata	Ketimpangan Akses Terhadap layanan Perpustakaan antara pusat ibukota dan daerah Terpencil	Lokasi geografis yang Terdiri dari Pulau-Pulau dengan keterbatasan layanan mobile seperti perpustakaan keliling
5	Minimnya Anggaran Dan Sumber Daya Manusia di Bidang Perpustakaan	Alokasi anggaran untuk program prioritas sangat terbatas	Alokasi yang terbatas Menghambat Pelaksanaan Program dan Pengembangan layanan
		Tenaga pengelola perpustakaan yang kurang kompeten	Keterbatasan Jumlah dan Kompetensi SDM Khusus di bidang Perpustakaan yang masih terbatas
6	Perubahan Prilaku Membaca	Meningkatnya penggunaan media digital	Kurangnya minat membaca
7	Pengelolaan Arsip yang belum Optimal	Arsip dinamis tidak dikelola sesuai standar	Kurangnya kompetensi SDM di bidang kearsipan Belum terbentuknya landasan baku kearsipan daerah
		Arsip statis banyak yang rusak atau belum didigitalisasi	Minimnya perhatian terhadap pelestarian arsip sebagai aset sejarah
8	Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi	Sistem pengelolaan arsip berbasis teknologi belum diterapkan	Infrastruktur teknologi yang belum memadai dan keterbatasan anggaran
9	Minimnya Anggaran Dan Sumber Daya Manusia di Bidang Arsip	Alokasi anggaran untuk program prioritas sangat terbatas	Alokasi yang terbatas Menghambat Pelaksanaan Program dan Pengembangan layanan
		Tenaga pengelola Kearsipan yang kurang kompeten	Keterbatasan Jumlah dan Kompetensi SDM Khusus di bidang Arsip yang masih terbatas
10	Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat tentang Pengelolaan Arsip	Budaya Sadar Arsip yang rendah pada masyarakat	Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Pengelolaan Arsip Sebagai Bagian dari Tata Kelola Pemerintahan

Tabel ini memberikan gambaran yang terstruktur tentang permasalahan utama yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Dengan memahami akar permasalahan, prioritas pembangunan dapat ditentukan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses, dan mendukung sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan.



## 2.8 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan
3. Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi yang inovatif
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, dan Pariwisata
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdapat pada Misi Ke 1 (kesatu) yaitu “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur” dan Misi Ke-3 (ketiga) yaitu “Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi yang inovatif



## 2.9 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan terhadap Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Renstra Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

### 2.9.1 Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, sangat perlu memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 dengan dipandu Visi : “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”, dengan uraian misi: “Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”.

Dari penjabaran visi dan misi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkaitan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

#### a. Tujuan Strategis

Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024.



b. Sasaran Strategis

Terwujudnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca dengan indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Nilai Kegemaran Membaca dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

### **2.9.2 Telaahan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia**

Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah juga perlu memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dengan dipandu Visi : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia; dan
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.
6. Memberikan akses arsip kepada publik untuk



kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Dari penjabaran visi dan misi Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkaitan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan Strategis

Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh dengan indikator tujuan Indeks Pemanfaatan Arsip.

b. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan, dengan indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Kebijakan Kearsipan.
2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Ketersediaan Arsip.
3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan.
4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolak



ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi

## **2.10 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, pada pasal 6 menyebutkan bahwa Penataan Ruang di Daerah bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah :

1. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan kegiatan;
2. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
3. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil- hasil olahan laut yang besar;
4. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan/risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Selanjutnya Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah diarahkan pada peningkatan literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas yang sejalan dengan muatan KLHS.

### **2.11 Penentuan Isu-isu Strategis**

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah serta menyesuaikan dengan dinamika organisasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi beberapa isu strategis yang perlu menjadi prioritas



dalam lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi dinas, serta tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikut adalah isu-isu strategis tersebut:

1. Peningkatan Literasi Masyarakat

Perlunya peningkatan minat dan budaya baca masyarakat sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan produktif.

2. Transformasi Digital dalam Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip

Aksesibilitas layanan melalui digitalisasi koleksi perpustakaan dan arsip perlu ditingkatkan serta pengembangan sistem informasi berbasis teknologi untuk layanan yang lebih cepat, transparan, dan akurat.

3. Penguatan Peran Perpustakaan sebagai Pusat Literasi dan Inklusi Sosial

Layanan perpustakaan yang inklusif bagi semua kelompok masyarakat, termasuk yang termarjinalkan perlu ditingkatkan di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. Optimalisasi Tata Kelola Arsip

Peningkatan kepatuhan instansi terhadap standar pengelolaan arsip untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

5. Penguatan SDM dan Sarana Prasarana

Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dan arsip serta penyediaan fasilitas yang lebih modern dan ramah teknologi perlu dilakukan kedepannya.

Isu-isu strategis ini menjadi panduan bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam merumuskan program kerja yang relevan dan berkelanjutan. Fokus pada penguatan



minat baca dan pengelolaan arsip daerah akan mendukung tercapainya visi daerah menuju masyarakat yang maju dan sejahtera dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berkomitmen untuk mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan literasi masyarakat dan pengelolaan arsip yang profesional. Dalam menyusun Rencana Strategis 2025-2029, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mengacu pada visi pembangunan Daerah dan Nasional dengan berfokus pada peningkatan akses layanan perpustakaan, pelestarian arsip sebagai warisan budaya, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Strategi ini dirancang untuk mendorong penguatan kualitas layanan, memperluas jangkauan inklusif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi dan pengelolaan arsip.

Tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya saing melalui literasi dan informasi. Dengan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menargetkan peningkatan pelayanan secara terukur dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.

Beberapa indikator sasaran dan tujuan berasal dari penilaian salah satu instansi pembina Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Adapun indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM). Apabila kedua indikator tersebut tidak dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah akan melakukan penilaian indikator secara mandiri.

Tabel berikut menggambarkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai, lengkap dengan indikator keberhasilan dan target tahunannya.



Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Nilai SAKIP (Predikat)	B	B	B	B	BB	BB	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP	61	63	65	67	71	73	
Meningkatkan kualitas literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	60,5	65,25	68,30	70,5	73,65	75	
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	76,75	76,85	76,95	77	77,1	77,2	
	Meningkatnya akses layanan perpustakaan	Rasio perpustakaan berbasis inklusi sosial	0.062	0.092	0.115	0.154	0.192	0.231	
Meningkatkan pengelolaan arsip		Rasio Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis	29.41	41.18	50.00	70.59	88.24	100.00	



	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis	Persentase Tingkat Pengelolaan Arsip	16.7	25.0	41.7	58.3	83.3	100.0	
		Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pengawasan Kearsipan	33.33	41.67	58.33	75.00	83.33	100.00	



### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mengimplementasikan berbagai strategi dan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pencapaian hasil yang diinginkan. Strategi ini akan melibatkan pendekatan yang berbasis pada pengelolaan perpustakaan dan arsip yang terencana, inklusif, dan berbasis teknologi. Penyusunan Rencana Strategis ini juga dilakukan dengan memperhatikan sinkronisasi terhadap kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Strategi yang dirumuskan bertujuan untuk peningkatan aksesibilitas layanan perpustakaan, pelestarian arsip, serta peningkatan literasi masyarakat. Elemen-elemen strategis ini dirancang untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap tantangan di era transformasi digital. Berikut adalah tabel yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah disusun untuk jangka waktu 2025 hingga 2029:

*Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan*

<b>Visi : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera</b>				
<b>Misi : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Luhur</b>				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan akses layanan perpustakaan dan memperkuat pengelolaan arsip	Meningkatnya ketersediaan perpustakaan yang inklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial</li> <li>Menyediakan layanan perpustakaan keliling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan fasilitas perpustakaan ramah pengguna</li> <li>Penambahan koleksi perpustakaan yang relevan</li> </ul>
		Meningkatnya literasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan program literasi berbasis komunitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan komunitas lokal</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketersediaan koleksi bacaan yang relevan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan promosi literasi</li> </ul>
		Pengembangan Perpustakaan digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem perpustakaan berbasis teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan dan pengelolaan koleksi digital</li> </ul>
		Arsip dinamis dikelola sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kompetensi SDM kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan pedoman pengelolaan arsip yang standar</li> </ul>
		Arsip Statis yang terkelola sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan program restorasi arsip</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan fasilitas pelestarian arsip yang memadai</li> </ul>
		Sistem Layanan Arsip Berbasis Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem arsip elektronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan infrastruktur teknologi informasi</li> </ul>
<b>Misi : Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif</b>				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan standar operasional pelayanan dan penguatan monitoring serta evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, pengawasan, dan pengelolaan berbasis teknologi</li> </ul>

Tabel ini menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya mencapai tujuan jangka menengah. Dengan arahan kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program yang dijalankan akan menghasilkan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah berjalan sinergis, transparan, dan bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas.



## **BAB IV**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan**

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya dalam pengembangan layanan perpustakaan yang inklusif, inovatif, dan berbasis teknologi, serta pengelolaan arsip yang efektif dan efisien sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merumuskan sejumlah program strategis yang akan menjadi fokus pelaksanaan selama periode 2025-2029. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dan isu strategis yang telah teridentifikasi sebelumnya, sekaligus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara terintegrasi.

Program-program tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti pengembangan layanan perpustakaan inklusif, promosi literasi, pengelolaan arsip dinamis, pelestarian arsip statis hingga transformasi digital. Melalui pelaksanaan program-program ini, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan minat baca dan literasi masyarakat. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus menjaga kelestarian dokumen sejarah dan warisan budaya daerah.

Berikut adalah daftar program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar-unit pemerintahan untuk mendukung tata kelola yang efisien dan efektif



- Program Pembinaan Perpustakaan

Program Pembinaan Perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, mendukung pengembangan literasi masyarakat, dan memperluas akses terhadap sumber informasi.

- Program Pengelolaan Arsip

Program Pengelolaan Kearsipan bertujuan untuk memastikan arsip sebagai sumber informasi dan bukti autentik dapat dikelola dengan baik sesuai standar nasional.

Rencana program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur dengan alokasi pendanaan yang optimal. Oleh karena itu, rencana ini juga mencakup estimasi kebutuhan anggaran yang disusun berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya. Harapannya, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelestarian kekayaan informasi daerah. Pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.



Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI TARGET	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.23.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	Akumulasi capaian tiap kegiatan/ jumlah total kegiatan (6)*100%	100.00	100.00	4,858,712,018.00	100.00	4,907,299,138.00	100.00	4,956,372,130.00	100.00	5,005,935,851.00	100.00	5,055,995,209.00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja (%)	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang sesuai perundang-undangan dibagi Jumlah dokumen	100.00	100.00	29,403,446	100.00	60,500,000	100.00	70,000,000	100.00	70,500,000	100.00	80,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	28,403,446	5	59,500,000	5	69,000,000	5	69,500,000	5	79,000,000	
Penyelenggaraan walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100	100	500,000	100	500,000	100	500,000	100	500,000	100	500,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang terselesaikan (%)	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Yang seharusnya ada dibagi jumlah dokumen yang terselesaikan	100.00	100.00	4,001,015,793.55	100.00	4,041,025,952	100.00	4,081,436,211	100.00	4,122,250,572	100.00	4,163,473,079	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	30	3,921,203,793.55	30	392,120,379,355	32	4,000,019,990	34	4,040,020,190	35	4,080,420,392	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	79,812,000	12	80,610,120	12	81,416,221	12	82,230,382	12	83,052,687	



Administrasi Umum Perangkat Daerah														
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan dibagi Jumlah Keseluruhan (5) *100%	100.00	100.00	323,017,598.00	100.00	323,500,000	100.00	326,306,101	100.00	327,500,000	100.00	328,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3	59,120,113	3	32,668,665.00	3	33,649,012.00	3	33,606,997	3	33,570,611
	Pelaksanaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	5	22,539,665	5	47,822,730.00	5	47,966,198.00	5	48,062,130	6	48,158,255
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	32,408,820	4	31,473,916.00	4	31,568,337.00	4	31,631,474	4	31,694,737
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	19,662,000	1	38,307,632.00	1	38,422,554.00	1	38,499,399	1	38,576,398
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dokumen)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	22	20	189,327,000	22	173,227,057.00	24	174,700,000.00	26	175,700,000	30	176,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan (%)	Jumlah barang milik daerah yang diadakan/jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah*100%	100%	100	328,916,364	100	361,000,000	100	361,500,000	100	362,000,000	100	362,500,000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7	2	28,890,000.00	2	49,399,602	3	49,550,000	5	50,000,000	8	50,250,000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	300,026,364	1	311,600,398	1	311,950,000	1	312,000,000	1	312,250,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Jumlah kebutuhan jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi/ seluruh kebutuhan jasa*100%	100%	100	82,077,968	100	70,000,000	100	70,500,000	100	72,500,000	100	73,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan )	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	62,077,968	12	49,960,000	12	50,419,920	12	51,415,916	12	51,810,496
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan )	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	0	20,000,000	0	20,040,000	0	20,080,080	0	21,084,084	0	21,189,504



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah yang terpelihara (%)	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik (kendaraan dinas, mebel dan peralatan mesin/3*100%)	100.00	100.00	50,585,000	100.00	51,273,186.00	100.00	46,629,817.00	100.00	51,185,278.70	100.00	49,022,130.30
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	2	50,585,000	5	51,273,186	10	46,629,817.00	12	51,185,278.70	12	49,022,130.30
Program Pembinaan Perpustakaan														
Meningkatnya Program Pembinaan Perpustakaan														
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (rasio)	Nilai rata-rata dari penjumlahan Tingkat Frekuensi Membaca, Tingkat Durasi Membaca, Tingkat Jumlah Bahan Bacaan, Frekuensi Akses Internet, dan Durasi	76.70	76.80	459,000,000	76.90	505,000,000	77.00	542,000,000	77.20	571,000,000	77.50	608,000,000
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Yang Dikembangkan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (%)	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional dibagi total jumlah perpustakaan KKA dikali 100%	0.79	11.81	289,125,189	23.62	305,000,000	31.50	325,000,000	43.31	350,000,000	51.18	385,000,000
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1	15	142,167,763	30	125,333,000	40	129,500,000	55	132,000,000	65	151,500,000
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77	40	39,788,000	50	110,167,000	60	115,000,000	80	117,500,000	100	121,000,000
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	382	150	107,169,426	200	69,500,000	250	80,500,000	300	100,500,000	500	112,500,000



Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerimaan Manfaat Pembudayaan Gemar Membaca (%)	Jumlah penerima manfaat gemar membaca (Jumlah kunjungan) dibagi Total jumlah penduduk KKA dikali 100%	20.00	24.00	131,501,100	30.00	200,000,000	34.00	217,000,000	38.00	221,000,000	40.00	223,000,000
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar	50	60	59,830,800	70	104,500,000	80	107,500,000	90	110,500,000	100	111,500,000
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	15	20	71,670,800	22	95,500,000	24	109,500,000	26	110,500,000	30	111,500,000
Program Pengelolaan Arsip														
Meningkatnya Program Pengelolaan Arsip														
		Persentase Ketersediaan Arsip Perangkat Daerah (%)	Persentase ketersediaan arsip Perangkat Daerah = (Jumlah Score ketersediaan arsip seluruh OPD / (Jumlah OPD * 100)) * 100	0	20.00	100,000,000	30.00	113,767,120.00	35.00	136,048,369.00	40.00	165,838,888.00	50.00	187,133,770.00
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota														
	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah (%)	= (Jumlah Score Pengawasan Kearsipan OPD dibagi (Jumlah OPD * 100)) * 100	0	25.00	105,561,335	30.00	113,767,120.00	40.00	136,048,369.44	50.00	165,838,888.00	55.00	187,133,770.00
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	80	150	51,730,585	200	37,767,120.00	250	50,548,369.44	300	63,338,888.00	400	80,133,770.00
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	53,830,750	1	76,000,000	1	85,500,000	1	102,500,000	1	107,000,000



## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode lima tahun ke depan diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mewujudkan pemerintahan yang berdaya saing di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini sejalan dengan visi dan misi daerah yang mengutamakan pelayanan prima melalui reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Capaian kinerja pada bidang urusan difokuskan pada indikator-indikator yang mencerminkan keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator kinerja ini mencakup berbagai aspek seperti nilai akuntabilitas, jumlah kunjungan perpustakaan pertahun, jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial, indeks literasi masyarakat, persentase arsip terkelola dengan baik, hingga persentase layanan arsip berbasis teknologi. Dengan demikian, target kinerja dirancang secara terukur untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program prioritas.

Berikut adalah tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:



**Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Predikat AKIP	Skor	B	B	B	B	BB	BB	
2	Nilai AKIP	Nilai	61.0	63.0	65.0	67.0	71.0	73.0	
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	60,5	65,25	68,30	70,5	73,65	75.0	
4	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Rasio	76,75	76,85	76,95	77.0	77,1	77,2	
5	Rasio perpustakaan berbasis inklusi sosial	Rasio	0.062	0.092	0.115	0.154	0.192	0.231	
6	Rasio Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis	Rasio	29.41	41.18	50.00	70.59	88.24	100.00	
7	Persentase Tingkat Pengelolaan Arsip	Persentase	16.7	25.0	41.7	58.3	83.3	100.0	
8	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pengawasan Kearsipan	Persentase	33.33	41.67	58.33	75.00	83.33	100.00	

**Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kunci**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (rasio)	Rasio	76.75	76.8	76.9	77	77.2	77.5	
2	Persentase Penerimaan Manfaat Pembudayaan Gemar Membaca (%)	Persentase	22%	24%	30%	34%	38%	40%	
3	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah (%)	Persentase	20%	25%	30%	40%	50%	55%	

Tabel ini mencerminkan komitmen Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.



## BAB V PENUTUP

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang didukung oleh pengelolaan perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat dan arsip sebagai sumber informasi yang autentik serta warisan budaya. Melalui pelaksanaan program-program prioritas yang berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, pembinaan perpustakaan dan pengelolaan arsip, diharapkan seluruh sasaran strategis dapat tercapai secara efektif dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Kesuksesan ini tidak hanya akan mendukung tercapainya visi pembangunan daerah tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan pembangunan di masa depan.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berkomitmen untuk terus berinovasi, meningkatkan profesionalisme, dan memperluas akses terhadap layanan yang diberikan.

Tarempa, 15 September 2025

Kepala Dinas  
Perpustakaan dan Arsip Daerah,



Rusmanda Azmurani, S.Sos.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197006242003121005